

Indonesian Parliamentary Center,
Transparency International Indonesia, dan Indonesia Budget Center

**MANUAL
BASE-LINE SURVEY
PENDAPAT PARA TOKOH (OPINION LEADER)
TENTANG *OPEN PARLIAMENT* DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

I. Latar Belakang

Open Parliament sendiri merupakan inisiatif global untuk mendorong transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan inovasi parlemen melalui kerja bersama antara DPR dan masyarakat sipil. Secara spesifik survei ini bertujuan memperoleh gambaran mengenai kebutuhan publik terhadap informasi parlemen dan kebutuhan partisipasi di parlemen.

Di Indonesia, Open Parliament dideklarasikan oleh DPR RI pada 29 Agustus 2018 dengan lima komitmen yang tertuang dalam National Action Plan (NAP) 2018 – 2020. Komitmen tersebut antara lain peningkatan manajemen data dan layanan Informasi legislasi, promosi pemanfaatan teknologi informasi, promosi transparansi informasi publik di parlemen.

Sehubungan dengan keterbukaan parlemen, sesungguhnya beberapa peraturan perundang-undangan telah memerintahkan DPR RI untuk membuka akses kegiatan dan dokumen, seperti Undang-undang 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPR, Undang-undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Arsip, dan Undang-undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Baseline Survei Keterbukaan Parlemen, dirancang untuk mendapatkan perspektif publik mengenai informasi publik yang dibutuhkan dari parlemen (substansi, bentuk, cara penyampaian, dan lain-lain), pelaksanaan fungsi-fungsi DPR termasuk pelaksanaan reses dan agenda-agenda penyerapan aspirasi (sosialisasi, keterjangkauan konstituen, tindak lanjut pelaksanaan fungsi, dan lain-lain), partisipasi (prosedur, sarana, dan lain-lain), serta berbagai hal lainnya.

Dengan adanya Baseline Survey Keterbukaan Parlemen yang menghimpun beragam perspektif publik ini, desain Open Parliament yang dikembangkan DPR dapat berpengaruh positif bagi kinerja dan akuntabilitas DPR serta respon konstituen dari tahun-tahun sebelumnya.

Secara lebih spesifik lebih spesifik dirancang untuk menggali pendapat para tokoh (opinion leader) yang dinilai memiliki concern dan intensitas interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan publik yang berhubungan dengan keputusan DPR RI.

II. Tujuan

Mendapatkan base-line data pendapat para tokoh (opinion leader) penilaian mengenai keterbukaan parlemen DPR Republik Indonesia dan mengenai kebutuhan publik terhadap informasi parlemen.

III. Out-put

Base-line data pendapat para tokoh (opinion leader) penilaian mengenai keterbukaan parlemen DPR Republik Indonesia dan mengenai kebutuhan publik terhadap informasi parlemen.

IV. Alur dan Aspek Base-line



Survei dilakukan berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan oleh IPC terhadap inisiatif implementasi open parliament DPR RI. Dengan demikian keberadaan survei akan melakukan cross-check kepada publik mengenai: (i) pengetahuan publik tentang inisiatif open parliament yang telah dilakukan maupun aspek-aspek yang telah berjalan berdasarkan mandate peraturan perundang-undangan, (ii) penilaian publik terhadap aspek-aspek/mechanisme parlemen yang telah berjalan dalam rangka mendorong pelaksanaan open parliament, (iii) rekomendasi publik mengenai informasi parlemen yang harus disampaikan kepada publik secara terbuka.

V. Metodologi

Base line Survei ini dilakukan dengan mewawancarai tatap muka terhadap responden para tokoh yang dinilai memiliki concern dan intensitas interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan publik yang berhubungan dengan keputusan DPR RI. Responden para tokoh akan ditentukan secara purposive berdasarkan kategori:

1.	NGO/CSO/LSM	6.	Tokoh masyarakat
2.	ORMAS	7.	Pelaku usaha/bisnis
3.	Akademisi	8.	Pemerintah
4.	Peneliti	9.	Politisi/Partai Politik
5.	Jurnalis/media	10.	Anggota DPRD

Sementara jumlah sampel responden ditentukan secara quota yang akan didistribusikan menurut kategori yang telah ditentukan. Jumlah sampel responden survei ini adalah 100 responden tokoh. Survei ini tidak dirancang untuk mendapatkan data agregat populasi rumah tangga sehingga tidak signifikan perhitungan margin of error seperti lazimnya dalam survei rumah tangga/populasi.

Tabel distribusi responden

No	Kategori	Jumlah responden
1.	NGO/CSO/LSM	10
2.	ORMAS	10
3.	Akademisi	10
4.	Peneliti	10
5.	Jurnalis/media	10
6.	Tokoh masyarakat	10
7.	Tokoh masyarakat	10
8.	Pelaku usaha/bisnis	10
9.	Pemerintah	10
10.	Politisi/Partai Politik	10
TOTAL		100

VI. Lokasi

Lokasi survei dilaksanakan di DKI Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) dan Kota Bandung. Pertimbangan pemiliha kedua lokasi tersebut karena (1) DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Jakarta merupakan wilayah dimana bertempat DPR sehingga intensitas publik lebih tinggi dan (ii) Kota Bandung representasi daerah yang dekat dengan DPR RI.

VII. Waktu pelaksanaan

Pelaksanaan survei dilakukan mulai tanggal 19 sampai dengan 5 September.

Indonesian Parliamentary Center,
Transparency International Indonesia, dan Indonesia Budget Center

ISU SURVEI OPEN PARLIAMENT

Aspek Data	Out-put Data	Pertanyaan	Pengukuran
Pengetahuan terhadap program Open Parlemen	Deskripsi tingkat pengetahuan masyarakat tentang komitmen DPR RI melaksanakan <i>open parliament</i> dengan memberikan informasi	Apakah B/I/S pernah mendengar/tahu tentang program open parliament?	Data Nominal: 1= Ya 2= Tidak
		Apakah B/I/S pernah mendengar/tahu bahwa DPR RI telah mendeklarasikan inisiatif open parliament?	
Fungsi DPR	Deskripsi skala pelaksanaan <i>open parliament</i> berdasarkan fungsi DPR RI	Berikan penilaian tingkat urgensi implementasi open parliament berdasarkan fungsi DPR RI berikut: 1. Legislasi 2. Budgeting 3. Pengawasan 4. Pemilihan pimpinan lembaga negara 5. Pemilihan hakim agung 6. Pemilihan hakim konstitusi	Data ordinal dengan skala 1 s.d 5 1 = Sangat tidak mendesak 5 = Sangat mendesak
Informasi	Deskripsi kebutuhan publik dan terhadap jenis informasi	Menurut B/I/S data-data apa saja yang HARUS dibuka kepada publik: [MULTIPLE RESPONSES]	Data Nominal: 1. Usulan prolegnas 2. Hasil prolegnas 3. Jadwal sidang 4. Jadwal reses/kunker 5. Anggaran DPR RI
	Deskripsi mekanisme akses informasi publik	Apakah mekanisme informasi publik yang diselenggarakan oleh DPR RI sudah memadai, sesuai kebutuhan publik?	Data ordinal dengan skala 1 s.d 5 1 = Sangat tidak memadai 5 = Sangat memadai

Indonesian Parliamentary Center,
Transparency International Indonesia, dan Indonesia Budget Center

		Apa sistem informasi yang HARUS dikembangkan oleh DPR RI untuk memberikan akses informasi kepada publik	Data Nominal: 1. Sistem informasi legislasi 2. Sistem informasi persidangan 3. Sistem informasi kunker anggota dewan
Partisipasi Publik	Deskripsi model partisipasi publik untuk mendorong dan mengawal pelaksanaan program open parliamen	Menurut B/I/S, bagaimana model/mekanisme partisipasi publik untuk mendorong implementasi <i>open parliament</i> ?	Data Nominal: 1. Berperan sebagai Watch Dog 2. Berkolaborasi dengan DPR RI
Kinerja DPR	Deskripsi kebutuhan terhadap laporan pertanggungjawaban publik kinerja DPR, Fraksi dan anggota DPR	Menurut B/I/S, seberapa dibutuhkan DPR RI membuat laporan publik mengenai hasil kerjanya berdasarkan fungsi dan kewenangannya?	Data ordinal dengan skala 1 s.d 5 1 = Sangat tidak dibutuhkan 5 = Sangat dibutuhkan
		Menurut B/I/S, seberapa dibutuhkan masing-masing fraksi di DPR RI, membuat laporan publik mengenai hasil kerjanya berdasarkan fungsi dan kewenangannya?	
		Menurut B/I/S, seberapa dibutuhkan masing-masing fraksi di DPR RI, membuat laporan publik mengenai pelaksanaan reses/kunjungan kerja baik peroangan maupun kelompok?	
		Apakah diperlukan mekanisme punishment dan reward untuk mendorong akuntabilitas kinerja Fraksi dan anggota DPR	